

## DINAMIKA POLITIK LOKAL DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PARIWISATA: STUDI KASUS KAWASAN WISATA UBUD

Marsia Herawati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Mei 2025

Revised Mei 2025

Accepted Mei 2025

Available online Mei 2025

[siagianmarsia@gmail.com](mailto:siagianmarsia@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

**Abstract.** *This study explores the local political dynamics in the development of tourism economy in Ubud, Bali, focusing on the interactions among regional government, traditional village institutions, and tourism entrepreneurs. As a cultural and natural tourist destination, Ubud faces several challenges due to rapid tourism growth, including land-use conflicts, cultural commodification, and weak inter-agency coordination. Using a qualitative case study approach through interviews, observation, and document analysis, the research reveals that the tension between cultural preservation and economic interest lies at the heart of local tourism policy conflicts. Findings indicate that although multi-stakeholder communication forums have been established, their implementation remains suboptimal. Community-based initiatives such as ecotourism and cultural tourism emerge as viable alternatives for sustainable development. The study recommends strengthening institutional synergy and communication to ensure balanced tourism development in Ubud that respects local values.*

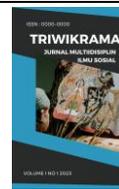
**Keywords :** *Local Politics, Tourism Development, Ubud, Traditional Villages, Sustainable Development*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas dinamika politik lokal dalam pengembangan ekonomi pariwisata di kawasan Ubud, Bali, dengan menekankan interaksi antara pemerintah daerah, desa adat, dan pelaku usaha. Ubud sebagai destinasi pariwisata budaya dan alam menghadapi berbagai tantangan akibat pertumbuhan pariwisata yang pesat, termasuk konflik alih fungsi lahan, komersialisasi budaya, serta lemahnya koordinasi antar aktor. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, penelitian ini mengungkap bahwa ketegangan antara pelestarian budaya dan kepentingan ekonomi merupakan inti dari konflik kebijakan pariwisata lokal. Temuan menunjukkan bahwa meskipun forum komunikasi antar aktor telah dibentuk, efektivitasnya masih terbatas. Inisiatif lokal berbasis partisipatif seperti ekowisata dan pariwisata budaya muncul sebagai solusi alternatif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sinergi dan komunikasi lintas kelembagaan sebagai kunci pengembangan pariwisata Ubud yang seimbang secara ekonomi, sosial, dan budaya.

**Kata Kunci :** Politik Lokal, Pengembangan Pariwisata, Ubud, Desa Adat, Pembangunan Berkelanjutan

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di kawasan yang kaya budaya dan alam seperti Ubud, Bali. Sebagai destinasi wisata internasional, Ubud dikenal dengan seni, tradisi, dan keindahan alamnya yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, perkembangan pesat pariwisata di Ubud tidak terlepas dari



dinamika politik lokal yang kompleks. Pemerintah daerah, desa adat, dan pelaku usaha lokal merupakan aktor-aktor utama yang saling berinteraksi, berkolaborasi, bahkan bersaing dalam pengelolaan kawasan. Menurut Widiastana (2021), kebijakan pariwisata lokal seringkali lahir dari negosiasi antar aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Sayangnya, kondisi ini bisa memicu konflik dan ketidakkonsistenan arah pembangunan.

Selain itu, berbagai isu lingkungan dan sosial seperti *overtourism* (pariwisata berlebihan), alih fungsi lahan, serta komersialisasi budaya semakin memperumit dinamika pembangunan pariwisata di Bali. *Overtourism* telah menyebabkan tekanan luar biasa terhadap infrastruktur lokal, kelangkaan air bersih, serta meningkatnya volume sampah dan polusi yang berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat setempat. Alih fungsi lahan dari pertanian menjadi akomodasi pariwisata juga berdampak pada hilangnya ruang hijau dan terganggunya ketahanan pangan lokal. Di sisi lain, komersialisasi budaya membawa implikasi serius terhadap makna dan nilai-nilai asli dari tradisi yang dijalankan masyarakat Bali. Seperti yang dicatat oleh Yuliani dan Prabawa (2022), pariwisata modern sering kali memicu pergeseran nilai serta komodifikasi budaya lokal, di mana budaya tidak lagi dipraktikkan sebagai bagian dari kehidupan spiritual dan sosial masyarakat, melainkan dipertontonkan untuk memenuhi ekspektasi wisatawan. Fenomena ini, jika dibiarkan, berpotensi mengikis identitas kultural masyarakat Bali yang selama ini menjadi daya tarik utama pariwisata itu sendiri.

Pemerintah sebenarnya telah menyadari tantangan ini dan mencoba mengatasinya dengan menerapkan berbagai kebijakan berkelanjutan, seperti pengaturan tata ruang serta penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat dan lingkungan (Suryana, 2020). Namun, implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari harapan. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar-stakeholder. Astuti dan Suwena (2023) menyoroti kurangnya kerja sama antara lembaga pemerintah dengan desa adat sebagai faktor penghambat utama dalam pelaksanaan program-program berkelanjutan. Desa adat, yang sejatinya memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan, sering kali tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan kesenjangan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan yang tidak kontekstual dengan kebutuhan dan nilai lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif agar pelestarian budaya dan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pengembangan sektor pariwisata secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana dinamika politik lokal memengaruhi pengembangan ekonomi pariwisata di Ubud, siapa aktor-aktornya, serta apa saja tantangan dan peluangnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dinamika politik lokal terhadap pengembangan pariwisata di Ubud, mengidentifikasi aktor yang terlibat, serta mengungkap pola interaksi dan tantangan yang muncul. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian politik lokal dan pariwisata; secara praktis, memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah, desa adat, dan pelaku usaha dalam merancang pembangunan pariwisata yang partisipatif, berkelanjutan, dan berakar pada nilai budaya lokal.

## KAJIAN TEORI

### Politik Lokal

Politik lokal mengacu pada proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah yang melibatkan berbagai aktor lokal seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga adat, LSM, dan pelaku usaha. Menurut Santoso dan Wibowo (2022), politik lokal sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan pembangunan, termasuk sektor pariwisata. Dalam konteks pariwisata, dinamika politik lokal menentukan arah kebijakan yang sering kali menjadi arena negosiasi kepentingan antara pelestarian budaya, pembangunan ekonomi, dan kekuasaan politik.

### Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang menempatkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai fondasi utama dalam pengembangannya. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kelangsungan ekosistem dan budaya lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Menurut Putri dan Hidayat (2023), pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan agar aktivitas pariwisata tidak merusak ekosistem alam dan sumber daya yang ada. Hal ini mencakup pengelolaan penggunaan air, pengendalian limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati yang menjadi ciri khas daerah tujuan wisata. Selain itu, pelestarian budaya lokal juga menjadi elemen krusial dalam pembangunan ini. Budaya tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, tetapi juga sebagai warisan yang harus dijaga keberlanjutannya agar tidak tergerus oleh pengaruh eksternal yang bersifat komersial.

Selain aspek lingkungan dan budaya, partisipasi aktif masyarakat lokal juga menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek atau penerima manfaat, melainkan juga sebagai pelaku utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pariwisata. Dengan demikian, pembangunan ini dapat menciptakan dampak sosial positif seperti peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan ini juga membantu mengurangi konflik sosial dan resistensi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan secara sepihak.

Lebih jauh, pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan konservasi lingkungan dan budaya secara harmonis, sehingga pariwisata tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga manfaat jangka panjang berupa kelestarian sumber daya alam dan budaya yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan demikian, pembangunan pariwisata berkelanjutan bukan hanya sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan agar destinasi wisata tetap eksis dan mampu bersaing di tengah dinamika global tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.

## Partisipasi dan Kelembagaan Lokal

Partisipasi masyarakat menjadi aspek yang sangat krusial dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, terutama di kawasan yang kaya akan tradisi dan budaya seperti Ubud. Dalam konteks ini, masyarakat lokal bukan hanya sebagai penerima manfaat atau objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pariwisata. Menurut Pratama dan Dewi (2021), keterlibatan aktif masyarakat serta lembaga adat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan pariwisata mampu meningkatkan legitimasi kebijakan yang diterapkan sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai kultural yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan norma dan tradisi lokal yang telah lama dijaga.

Lebih jauh, kelembagaan lokal seperti struktur sosial adat di Ubud memegang peranan sentral sebagai mediator atau jembatan antara kepentingan masyarakat tradisional dengan kebijakan pemerintah formal. Lembaga adat ini berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang menjadi landasan hidup masyarakat, sekaligus sebagai fasilitator dialog dan negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Peran lembaga adat sangat vital dalam memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan pelestarian budaya dan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan adanya sinergi yang kuat antara lembaga adat dan pemerintah, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Di samping itu, partisipasi masyarakat melalui lembaga adat juga berkontribusi dalam menjaga harmoni sosial dan menghindarkan terjadinya konflik yang sering muncul akibat ketimpangan kepentingan antara pelaku pariwisata dan masyarakat lokal. Melalui proses musyawarah adat dan konsultasi publik, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik sehingga pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan dukungan penuh dari warga setempat. Pendekatan partisipatif ini juga memperkuat identitas budaya lokal dan mendorong terciptanya inovasi pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik wisatawan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya di kawasan Ubud.

## Kepentingan dan Negosiasi

Konflik kepentingan dalam pembangunan pariwisata sering kali muncul sebagai konsekuensi dari perbedaan tujuan dan kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, serta lembaga adat. Menurut Yuliani dan Suryawan (2024), konflik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan alami dalam proses pembangunan. Namun, apabila konflik ini dapat dikelola secara efektif, bukan tidak mungkin konflik tersebut justru menjadi pemicu munculnya solusi kompromi yang menguntungkan semua pihak. Pengelolaan konflik yang tepat memungkinkan terjadinya dialog terbuka dan pemahaman yang lebih baik antara para pemangku kepentingan, sehingga potensi ketegangan dapat diminimalisir dan tujuan pembangunan dapat lebih mudah tercapai secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, teori negosiasi yang dikemukakan oleh Rahman dan Kusuma (2020) memberikan kerangka kerja penting yang menekankan perlunya komunikasi yang efektif dan strategi win-win dalam menyelesaikan konflik kepentingan. Komunikasi yang terbuka dan jujur antar pihak menjadi kunci untuk mengungkapkan kepentingan, kebutuhan, dan batasan masing-masing aktor. Dengan pendekatan negosiasi yang mengedepankan prinsip win-win, maka setiap pihak tidak hanya berusaha memenangkan kepentingannya sendiri, melainkan juga berusaha mencari titik temu yang dapat memberikan manfaat bersama. Hal ini sangat penting dalam pembangunan pariwisata yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan latar belakang, kepentingan, dan pandangan yang berbeda-beda.

Lebih jauh lagi, pengelolaan konflik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip negosiasi efektif ini juga dapat meningkatkan kepercayaan antar pihak, memperkuat kerjasama, dan membangun jaringan kemitraan yang solid dalam jangka panjang. Proses negosiasi yang inklusif dan partisipatif membuka ruang bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka terkait dampak pembangunan pariwisata. Selain itu, pihak pemerintah dan pelaku usaha juga dapat lebih memahami peran serta tanggung jawab sosial mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya setempat. Dengan demikian, konflik yang awalnya berpotensi merusak dapat berubah menjadi peluang kolaborasi yang menghasilkan kebijakan pariwisata yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

## METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada kawasan pariwisata Ubud, Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- (1) Wawancara mendalam terhadap aktor-aktor kunci, seperti pejabat pemerintah daerah, pemuka adat, pelaku usaha pariwisata, dan tokoh masyarakat.

Wawancara mendalam dilakukan sebagai salah satu teknik utama dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendetail dari berbagai aktor kunci yang berperan penting dalam pengelolaan dan perkembangan kawasan pariwisata Ubud. Para aktor yang menjadi fokus wawancara meliputi pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata, pemuka adat yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi masyarakat setempat, pelaku usaha pariwisata yang terdiri dari pengelola hotel, restoran, biro perjalanan wisata, serta pelaku usaha lain yang terkait langsung dengan sektor pariwisata, dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh serta peran aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di kawasan tersebut.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi para narasumber secara terbuka dan mendalam. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak hanya berfokus pada fakta-fakta administratif atau teknis, tetapi juga pada bagaimana para aktor memahami tantangan dan peluang yang muncul, dinamika sosial yang terjadi, serta harapan mereka terhadap perkembangan pariwisata di Ubud. Metode wawancara ini memungkinkan peneliti untuk menangkap

nuansa dan makna yang terkandung dalam setiap jawaban, serta memperoleh data yang kaya konteks dan reflektif.

Proses wawancara juga memberikan ruang bagi narasumber untuk menyampaikan pandangan mereka secara personal dan jujur, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan beragam. Selain itu, wawancara ini juga membuka kesempatan bagi peneliti untuk melakukan klarifikasi langsung apabila terdapat jawaban yang kurang jelas, serta mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan respons yang diberikan. Dengan demikian, wawancara mendalam menjadi instrumen penting dalam memahami berbagai perspektif dan interaksi antara aktor-aktor yang berperan dalam ekosistem pariwisata Ubud secara menyeluruh.

- (2) Observasi partisipatif terhadap proses perumusan kebijakan, kegiatan pariwisata, dan dinamika sosial yang muncul.

Observasi partisipatif dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman langsung tentang bagaimana proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kegiatan pariwisata, serta dinamika sosial berlangsung di kawasan Ubud. Metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga ikut terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang berlangsung di lapangan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengamati secara langsung interaksi antara berbagai aktor, proses pengambilan keputusan, serta bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Observasi ini mencakup pengamatan terhadap rapat-rapat perumusan kebijakan yang melibatkan pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga peneliti dapat menangkap secara nyata bagaimana proses negosiasi, kompromi, dan pengambilan keputusan terjadi. Selain itu, peneliti juga mengamati kegiatan pariwisata seperti pelaksanaan event budaya, operasional usaha pariwisata, dan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Melalui observasi ini, dinamika sosial yang muncul seperti respon masyarakat terhadap perubahan yang dibawa oleh pariwisata juga dapat teridentifikasi dengan lebih jelas.

Keikutsertaan aktif dalam kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada peneliti untuk merasakan suasana dan konteks sosial yang mempengaruhi perkembangan pariwisata, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan kontekstual. Observasi partisipatif juga membantu dalam menangkap fenomena-fenomena yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau studi dokumentasi, seperti sikap, ekspresi non-verbal, dan kebiasaan-kebiasaan lokal yang berperan penting dalam proses sosial. Dengan demikian, metode observasi partisipatif ini menjadi alat yang efektif untuk memahami kompleksitas proses dan interaksi sosial di kawasan pariwisata Ubud secara menyeluruh dan mendalam.

- (3) Studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan daerah, regulasi pariwisata, serta arsip-arsip terkait.

Studi dokumentasi dilakukan sebagai salah satu metode pengumpulan data yang krusial untuk memperoleh informasi dan bukti tertulis yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Peneliti menelaah berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan

kawasan pariwisata Ubud, seperti dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan strategi pembangunan pariwisata di tingkat kabupaten maupun desa. Dokumen perencanaan ini memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta target yang ingin dicapai dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan budaya.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji regulasi dan peraturan-peraturan yang mengatur tata kelola pariwisata di kawasan tersebut. Regulasi ini mencakup peraturan pemerintah daerah, kebijakan pariwisata nasional yang diadopsi di tingkat lokal, serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelestarian budaya dan lingkungan hidup. Dengan mempelajari regulasi tersebut, peneliti dapat memahami kerangka hukum dan norma-norma yang menjadi landasan operasional pariwisata di Ubud.

Tidak kalah penting, arsip-arsip terkait lainnya juga dikumpulkan dan dianalisis, seperti laporan kegiatan, hasil evaluasi program, dokumen sejarah perkembangan pariwisata, serta publikasi atau artikel yang relevan. Studi dokumentasi ini berfungsi sebagai sumber data sekunder yang dapat menguatkan temuan dari wawancara dan observasi. Selain itu, melalui analisis dokumen, peneliti dapat menelusuri perkembangan kebijakan dan implementasinya dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi kesenjangan atau perubahan yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata.

Dengan demikian, studi dokumentasi menjadi bagian integral dari proses penelitian yang membantu membangun kerangka analisis yang komprehensif dan memastikan data yang diperoleh memiliki dasar yang kuat dan terpercaya.

Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana yang disarankan oleh Miles dan Huberman (1994). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh.

## PEMBAHASAN

Konflik antara desa adat dan investor sering kali menjadi isu yang krusial dalam pengembangan pariwisata di kawasan Ubud, khususnya terkait dengan alih fungsi lahan pertanian seperti sawah menjadi area komersial seperti vila atau restoran. Perubahan fungsi lahan ini bukan hanya berdampak pada aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga menyentuh ranah sosial dan budaya masyarakat adat yang selama ini mengelola dan menjaga lahan tersebut sebagai bagian dari identitas dan tradisi mereka. Yuliani dan Prabawa (2022) menegaskan bahwa ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi dari pengembangan lahan tersebut sering kali terjadi, di mana investor dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan finansial yang besar, sementara masyarakat adat yang terdampak justru merasa dirugikan karena kehilangan lahan produktif dan ruang hidup budaya. Kondisi ini menimbulkan ketegangan yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial di kawasan tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai pihak—termasuk pemerintah daerah, desa adat, dan pelaku usaha—telah mencoba melakukan upaya sinergi melalui pembentukan forum komunikasi bersama. Forum ini dirancang sebagai wadah dialog dan negosiasi untuk mencari solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan semua pihak, baik dari sisi ekonomi,

sosial, maupun budaya. Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Astuti dan Suwena (2023), pelaksanaan forum komunikasi ini belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah lemahnya komitmen dari beberapa pihak terkait dan kurangnya koordinasi yang efektif antar lembaga yang terlibat. Selain itu, perbedaan kepentingan dan prioritas masing-masing aktor juga menjadi kendala dalam mencapai kesepakatan bersama. Akibatnya, proses negosiasi seringkali terhambat dan solusi yang dihasilkan tidak selalu implementatif di lapangan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, muncul pula inisiatif lokal yang berasal dari komunitas masyarakat sendiri, yang berupaya mengembangkan model pariwisata alternatif berbasis ekowisata dan pariwisata budaya secara partisipatif. Pendekatan ini menekankan keterlibatan langsung masyarakat adat dan warga lokal dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, dengan tujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian lingkungan dan nilai-nilai budaya yang ada. Inisiatif semacam ini dianggap sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pariwisata massal yang cenderung mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat namun sering mengabaikan dampak negatif sosial dan lingkungan. Melalui ekowisata dan pariwisata budaya yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat secara adil, sehingga pembangunan pariwisata dapat selaras dengan upaya pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan. Berikut hasil wawancaranya

Wawancara dengan Bapak Ketut Wirama (Perangkat Desa Adat Ubud)

*"Kami memang sangat menjaga agar pembangunan pariwisata tidak merusak adat dan budaya kami. Banyak warga yang menolak perubahan lahan sawah menjadi vila karena itu berarti hilangnya ruang hidup tradisional. Pemerintah dan investor sering kurang memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya."*

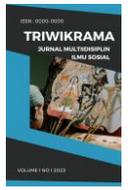
Wawancara dengan Ibu Made Sari (Pelaku Usaha Pariwisata)

*"Sebagai pengusaha, kami tentu ingin pariwisata terus berkembang untuk meningkatkan pendapatan. Namun kami juga paham perlunya dialog dan kompromi dengan desa adat supaya pengembangan ini tidak sampai merusak nilai-nilai lokal. Kadang-kadang memang ada gesekan, tapi kami mencoba mencari titik tengah."*

Wawancara dengan Bapak Nyoman Suarta (Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar)

*"Pemerintah berupaya menyediakan regulasi dan infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata di Ubud. Namun, kami menyadari pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam setiap tahap perencanaan agar tidak terjadi konflik. Kami juga mendorong pembentukan forum komunikasi untuk meningkatkan koordinasi antar aktor."*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dinamika politik lokal di Ubud dalam pengembangan pariwisata memang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan yang kadang bertolak belakang. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pengatur kebijakan, pelaku usaha mendorong pertumbuhan ekonomi pariwisata, sementara masyarakat adat fokus pada pelestarian budaya dan lingkungan. Konflik terjadi terutama pada isu alih fungsi lahan yang sensitif bagi masyarakat adat. Sinergi dan komunikasi yang lebih baik antar pemangku



kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

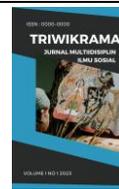
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi pariwisata di kawasan Ubud sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal yang melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah kabupaten, desa adat, dan pelaku usaha pariwisata. Pemerintah daerah berperan penting dalam perumusan kebijakan dan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata, namun dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi resistensi dari masyarakat adat yang berusaha mempertahankan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan.

Konflik yang muncul, terutama terkait alih fungsi lahan sawah menjadi area komersial seperti vila dan restoran, mencerminkan ketimpangan dalam pembagian manfaat ekonomi antara investor dan masyarakat adat. Upaya untuk menjembatani kepentingan ini melalui forum komunikasi bersama belum mencapai hasil yang maksimal, disebabkan oleh kurangnya komitmen dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan.

Namun demikian, di tengah berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh kawasan pariwisata Ubud akibat arus perkembangan yang pesat, muncul berbagai inisiatif lokal berbasis komunitas yang berupaya mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Inisiatif-inisiatif ini menempatkan pendekatan ekowisata dan pariwisata budaya sebagai fondasi utama dalam pengelolaan pariwisata, dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga menempatkan pelestarian lingkungan dan warisan budaya sebagai prioritas utama. Komunitas-komunitas lokal mengambil peran sentral dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata dan kewajiban untuk menjaga kelestarian alam serta budaya yang menjadi identitas khas Ubud.

Model pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas ini menawarkan alternatif yang lebih seimbang dan holistik dibandingkan dengan model pengembangan pariwisata konvensional yang seringkali hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pariwisata, model ini membuka ruang bagi terciptanya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas lokal, serta pengembangan potensi budaya dan alam secara bertanggung jawab. Selain itu, pariwisata yang dibangun secara partisipatif ini mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap destinasi wisata, sehingga turut meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kebudayaan.

Lebih jauh, keberhasilan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Ubud sangat bergantung pada sinergi yang kuat dan komunikasi yang intensif antara berbagai pihak yang terlibat, yakni pemerintah daerah, lembaga desa adat, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat luas. Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung, sehingga tujuan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan juga membantu dalam mengatasi konflik kepentingan, memperkuat koordinasi,

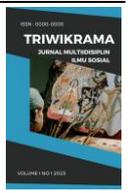


dan membangun rasa saling percaya yang merupakan fondasi utama dalam membangun kemitraan yang solid.

Dengan demikian, pengelolaan pariwisata di Ubud bukan hanya soal peningkatan jumlah wisatawan atau devisa, tetapi juga harus mampu menghormati dan melestarikan nilai-nilai lokal yang menjadi akar budaya masyarakat setempat. Pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya mendukung kemajuan ekonomi, tetapi juga menjaga harmoni sosial, memperkuat identitas budaya, dan melindungi lingkungan hidup. Pada akhirnya, model pengelolaan seperti ini dapat menjadi teladan bagi kawasan pariwisata lainnya di Indonesia maupun di dunia yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola pembangunan pariwisata secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, N. K., & Suwena, I. G. A. (2023). Sinergi Lembaga Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 14(2), 112-126. <https://doi.org/10.24843/JISP.2023.v14.i02.p08>
- Dewi, N. M., & Suardana, I. W. (2021). Konflik Lahan dan Pariwisata: Studi Kasus Desa Adat di Bali. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 9(1), 45-59.
- Fadli, M., & Kurniawan, T. (2022). Politik Lokal dan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 7(3), 78-92.
- Hartanto, R. (2024). Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Implikasinya terhadap Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 34-48.
- Hidayat, F., & Lestari, S. (2020). Peran Masyarakat Adat dalam Melestarikan Nilai Budaya Lokal di Tengah Pariwisata. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 35(2), 99-115.
- Kencana, A., & Wibowo, D. (2023). Pemberdayaan Komunitas Lokal dalam Pengembangan Ekowisata di Kawasan Ubud. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 11(1), 15-30.
- Nugraha, I. G. M., & Putra, A. D. (2022). Dinamika Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(4), 210-225.
- Prabawa, I. K., & Yuliani, S. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah terhadap Ketimpangan Ekonomi di Ubud. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(2), 56-70.
- Ramdhani, A., & Sari, P. (2021). Koordinasi Antar Lembaga dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 14(3), 121-135.
- Sari, R. M., & Putri, N. A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Bali. *Jurnal Studi Budaya dan Pariwisata*, 9(1), 40-54.
- Suryana, A. (2020). Resistensi Masyarakat Adat terhadap Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Ubud. *Jurnal Kebudayaan dan Politik Lokal*, 6(2), 88-102.
- Tanjung, M., & Santoso, E. (2024). Model Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 67-81.
- Utami, L., & Wijaya, R. (2021). Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dan Implikasinya terhadap Masyarakat Lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 10(3), 144-158.
- Wibowo, H., & Dewa, I. N. (2022). Strategi Pengelolaan Konflik antara Desa Adat dan Investor di Kawasan Wisata Bali. *Jurnal Politik Lokal dan Pembangunan*, 7(2), 33-47.



---

Yuliani, S., & Prabawa, I. K. (2022). Ketimpangan Ekonomi dalam Pengembangan Pariwisata di Ubud. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(4), 120-135.